

## Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo

Denny Indra Sukmawan<sup>1</sup>, Rodon Pedrason<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Departemen Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia

Received: (9 Mei 2022)

Revised: (21 Oktober 2022)

Published: (31 Oktober 2022)

### Abstrak:

Di masa pemerintahan Joko Widodo, kontrol sipil atas militer tergolong pragmatis. Artikel ini berangkat dari teori kontrol sipil pragmatis oleh Donald Travis dan mengulas tiga fenomena yang menandakan pragmatisme Joko Widodo dalam mengelola hubungan sipil militer: Pertama, banyaknya purnawirawan TNI/Polri yang terlibat aktif dalam politik partisan pada Pemilu 2014 dan 2019. Kedua, banyaknya perwira aktif TNI/ Polri yang merangkap jabatan sipil di Kementerian/ Lembaga dan BUMN. Tiga, berkembangnya militerisme masyarakat sipil. Selain itu, penulis menemukan beberapa hal terkait implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia: Pertama, sejumlah purnawirawan yang mengisi jabatan politik terlibat konflik kepentingan. Kedua, organisasi TNI/ Polri bisa berkuasa, walaupun tidak memerintah. Terlihat dari pos-pos jabatan yang diisi purnawirawan mereka di pemerintahan dan BUMN yang bergerak sektor energi dan pangan. Ketiga, militerisme masyarakat sipil mendorong sejumlah kelompok masyarakat sipil melakukan praktik sekuritisasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan bertumpu pada data sekunder dalam penulisan artikel ini.

### Kata kunci:

hubungan sipil-militer; kontrol sipil pragmatis; purnawirawan; politik militer; militerisme

### Pendahuluan

Dari artikel ini, penulis berargumen bahwa Presiden Joko Widodo sedang menjalankan kontrol sipil pragmatis dalam pemerintahannya. Sebelum membahas argumen ini lebih jauh, penulis perlu menjelaskan terlebih

---

### Korespondensi:

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: denny.indras@upnvj.ac.id

<sup>2</sup> Departemen Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan, Indonesia

Email: rodon.pedrason@idu.ac.id

dahulu apa itu kontrol sipil pragmatis. Dalam studi Hubungan Sipil-Militer (HSM), kontrol sipil pragmatis adalah salah satu teori kontemporer. Teori ini dikembangkan Donald Travis -salah satu pemerhati HSM di Amerika Serikat, dari pandangan Moritz Janowitz (1971) mengenai HSM. Travis, sama seperti pemerhati-pemerhati lain dalam diskursus ini, juga mengkritisi gagasan kontrol sipil subjektif dan objektif yang diajukan Huntington (1957). Kritik utamanya adalah teori Huntington dianggap tidak bisa membaca realitas keamanan nasional di Amerika Serikat.

Secara umum, kontrol sipil subjektif menekankan integrasi militer dalam sistem sosial dan politik di suatu negara. Apabila di masa perang, (personil) militer diambil dari sipil yang kemudian membentuk milisi (*militia*). Sementara di masa damai, mereka (milisi) akan kembali ke masyarakat dan bekerja sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, kontrol sipil objektif menekankan diferensiasi (pemisahan/ pembedaan) yang jelas antara ranah militer dan ranah sosial-politik. Dalam kontrol sipil objektif, militer diharapkan berkembang menjadi organisasi “profesional”, dengan parameter-parameter seperti: 1) mampu memiliki spesialisasi dan kompetensi yang berkaitan dengan konflik/perang -seperti menggunakan senjata, melumpuhkan lawan dll; 2) bisa menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik; 3) personilnya menghindari spesialisasi pada bidang-bidang teknis dan karir yang tidak terkait dengan organisasi militer -seperti pertanian, perkebunan, pertambangan dll; serta 4) organisasinya bersedia mematuhi pemimpin politik yang sah dan/atau otoritas tunggal yang diakui, -seperti Presiden. Lebih lanjut, Huntington (1957) juga menjelaskan kontrol sipil objektif akan optimal apabila militer juga bersedia untuk: 1) dipisahkan dari struktur sosial dan politik di dalam masyarakat; 2) ditugaskan di sektor pertahanan; 3) berpegang teguh pada nilai-nilai “tradisional” mereka, tanpa terpengaruh nilai-nilai dan ideologi yang berkembang di masyarakat; dan; 4) mengelola organisasinya dengan otonom dan independen.

Kontrol sipil pragmatis menolak argumen-argumen di atas. Alasannya, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara konstan akan memaksa organisasi (termasuk militer) untuk bersikap pragmatis dengan beradaptasi/berkompromi terhadap perubahan tersebut (Janowitz, 1971:418). Pragmatisme yang dimaksud Travis dapat ditinjau dari 4 aspek, yaitu: praktik, pluralistik, partisipatif dan provisional. Secara praktis, kontrol sipil atas militer harus diterjemahkan fleksibel, tergantung pada karakteristik konflik/perang, dan konteks lingkungan strategis (Hirshci, 2017). Fleksibilitas ini didukung realitas bahwa militer berada di tengah lingkungan sosial dan politik yang plural-demokratis. Oleh karena itu militer pun, baik secara institusi dan individu (personil, perwira dan purnawirawannya) bisa berperan dalam politik. Perlu digarisbawahi, Travis (2017:10) menekankan peran ini terbatas dalam proses perumusan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan ranah pertahanan dan keamanan nasional.

Berada di lingkungan plural-demokratis, militer juga dituntut untuk mampu bersikap terbuka (*open-minded*) dengan aktif bersinergi dan berkolaborasi bersama aktor-aktor politik lain. Baik pemimpin politik, institusi-institusi pemerintahan lain, ormas sipil, bahkan militer dari negara lain. Tujuannya semata-mata untuk mempertahankan negara dan menjaga stabilitas global (Travis, 2017: pp. 7). Walaupun demikian, militer pun harus mampu menjaga karakteristik dan keunikannya dibandingkan institusi lain. Seperti disiplin, kode etik, kapasitas di bidang operasi perang dan non-perang dan lain-lain (Travis, 2017, pp. 8).

Terakhir, Travis (2017: 14-15) menjelaskan implikasi dari kontrol sipil pragmatis setidaknya ada 4, yaitu: 1) membantu pemimpin politik dalam merespon perkembangan konflik/perang yang makin kompleks; 2) membangkitkan kemauan nasional (*national will*), satu elemen yang disebut Janowitz (1971) dan Clausewitz (1989), yang secara esensial menentukan ditengah kondisi konflik/perang; 3) mengingat esensi dari kontrol sipil pragmatis adalah integrasi militer di ranah politik, maka upaya pemisahan/pembedaan dianggap mengganggu HSM dan berdampak pada berkurangnya kekuatan nasional (*national power*) di suatu negara. Artinya, memaksakan kontrol sipil objektif pun hanya akan membatasi efektivitas militer dalam menjalankan tugasnya; dan 4) kontrol sipil pragmatis tidak ditujukan untuk mengurangi tensi HSM karena tensi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam HSM dan justru dilihat sebagai kekuatan pendorong komunikasi produktif -mis. dialog, diskusi dll antara sipil dengan militer.

Secara praktis, artikel ini menawarkan penjelasan alternatif atas kondisi HSM di Indonesia saat ini. Lalu dalam konteks akademis, artikel ini bisa dilihat sebagai kritik atas teori kontrol sipil pragmatis, dengan studi kasus yang diambil adalah HSM di masa pemerintahan Joko Widodo (periode pertama dan periode dua berjalan). Selain itu, artikel ini juga berkontribusi dalam perdebatan akademis antara Dr. Donald Travis (2017) dan Popescu (2018) dalam jurnal *Armed Forces and Society*.

Menurut penulis implementasi kontrol sipil pragmatis di masa pemerintahan Joko Widodo tercermin dari 3 kasus, yaitu: keterlibatan purnawirawan TNI/Polri dalam politik partisan dan kampanye politik, pengisian jabatan publik oleh purnawirawan TNI/Polri, dan berkembangnya militerisme masyarakat sipil. Dalam pembahasan, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan bahwa tujuan utama artikel ini adalah memahami implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia. Dengan mengambil 3 kasus, diharapkan artikel ini dapat menjelaskan seperti apa implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia dan apa saja kritik yang muncul terhadapnya, didasarkan pada *gap* antara kondisi ideal dengan realita di lapangan. Adapun pengumpulan data menekankan pada studi pustaka dari sumber-sumber data sekunder seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal yang pembahasannya relevan dengan kata kunci penulisan, konten-konten teks dan audiovisual dari website-website berita yang kredibel. Termasuk observasi penulis saat melihat perkembangan hubungan sipil militer di Indonesia.

## Purnawirawan TNI/Polri dalam Politik Partisan dan Kampanye Politik

Terdapat 3 pandangan, perihal boleh atau tidaknya purnawirawan terlibat dalam politik partisipan dan kampanye politik. Kelompok pertama menolak keterlibatan purnawirawan dengan alasan walaupun telah keluar dari korps dan institusinya, di dalam diri mereka masih terkandung nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai sosial di masyarakat. Penulis mengategorikan pandangan ini sebagai kelompok tradisional yang sangat terpengaruh pada pemikiran Huntington (1957). Kelompok kedua memperbolehkan keterlibatan purnawirawan, dengan syarat/ketentuan, seperti norma dan etika (telah keluar dari korps/institusinya, tidak korup dll); adanya batasan misalnya kebutuhan (atas kepakarannya); atau ketika keterlibatan itu di ranah-ranah tertentu misalnya politik kebangsaan/politik kenegaraan, sektor pertahanan dll. Penulis mengategorikan pandangan ini sebagai kelompok moderat yang menemukan kompromi antara pemikiran Huntington (1957) dan Janowitz (1971). Kelompok ketiga memperbolehkan keterlibatan purnawirawan dalam politik partisan, tanpa membatasi keterlibatan tersebut dengan syarat/ketentuan, ranah dll. Alasannya mulai dari menjamin hak politik, memang tradisi/pengaruh militer dalam politik di negara tersebut kuat khususnya di negara-negara fasis/ otoriter.

Dari ketiga kategori ini, Indonesia bisa masuk dalam kategori yang kedua, dimana keterlibatan purnawirawan dalam politik partisan dan kampanye politik sangat terasa selama pemilihan umum (Pemilu). Pada Pemilu 2014 misalnya, dalam tim pemenangan pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada 9 purnawirawan (detikNews A, 2014) yang berada di dalam. Jumlah ini belum termasuk 23 purnawirawan yang menyatakan dukungan politik, namun berada di luar tim pemenangan (Rinaldo, 2014). Sementara dalam tim pemenangan pasangan calon Prabowo Subianto – Hatta Rajasa ada 13 purnawirawan (detikNews B, 2014). Pada Pemilu 2019, di dalam tim kampanye pasangan calon Joko Widodo -Ma'aruf Amin ada 6 purnawirawan, sementara dalam tim kampanye pasangan calon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno ada 9 purnawirawan (Erdianto, 2018). Khusus untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, jumlah tersebut belum termasuk purnawirawan di Tim Bravo 5, Cakra 19, Elang 01 dan Jala Nusantara (Nurita, 2018) (Paat, 2019).

Sejauh ini, peran purnawirawan dalam politik partisan dan kampanye politik di Indonesia belum banyak diteliti secara mendalam. Namun, penulisan Aminuddin (2019) dapat menjadi landasan. Menurutnya, sebagai aktor politik purnawirawan memiliki 2 peran penting, yaitu: membangun partai, serta memaksimalkan kandidasi dan mobilisasi dalam Pemilu dan Pilkada. Aminuddin (2019) juga menemukan beberapa hal: Pertama, keahlian dan strategi militer yang diterapkan dalam proses kandidasi akan membawa keuntungan bagi partai politik, seperti komando lebih

terarah dan konsolidasi di internal partai lebih solid, dampaknya mobilisasi pemilih dalam pemilihan lebih efektif. Kedua, mengingat keterlibatan purnawirawan lebih banyak di kontestasi Pilpres dibandingkan Pileg, peran mereka diarahkan untuk merebut jabatan publik.

Namun perihal pragmatisme ini bisa dikritisi pada 3 hal: Pertama, soal pelibatan purnawirawan dalam politik partisan dan kampanye politik ternyata tidak menstimulus diskusi dan dialog produktif antara sipil dengan militer, seperti argumen Travis (2017). Selama Pemilu 2014 dan 2018, sejumlah purnawirawan justru berkontribusi “membuat gaduh” dan memperparah pembelahan politik di masyarakat. Kivlan Zen misalnya, menuduh beberapa partai pendukung Joko Widodo menjalin kerjasama dengan komunisme (CNN A Indonesia, 2018). Atau Hendropriyono yang menyebut Prabowo, saat itu kandidat Presiden, sebagai psikopat dan gila (Fiansyah, 2014). Di Indonesia, pembelahan-pembelahan politik yang distimulus oleh beberapa purnawirawan justru memperlemah kekuatan nasional (*national power*), tidak sesuai dengan argumen Travis (2017).

Kritik kedua, terkait motivasi purnawirawan untuk terlibat politik partisan dan kampanye politik selama Pemilu 2014 dan 2019. Terindikasi bukan ditujukan utama untuk politik kebangsaan/kenegaraan, namun lebih menjurus pada kepentingan ekonomi-politik personal/kelompoknya, atau sekedar ikut-ikutan karena alasan solidaritas. Indikasi ini terlihat dari sejumlah purnawirawan yang terlibat dalam tim pemenang/tim kampanye memiliki latar belakang pengusaha. Seperti Luhut Panjaitan, Hendropriyono, Moeldoko dan masih banyak lagi Richard (2021), Secara umum, motivasi purnawirawan untuk terlibat dalam politik partisan dan kampanye politik ada 3, yaitu: Investor, kelompok yang mencari posisi politik untuk dirinya/kerabatnya, atau akses politik untuk memperkuat/memperluas usahanya; Ideolog, kelompok yang berpartisipasi agar preferensi politik mereka diterjemahkan dalam kebijakan publik; Terakhir teman dekat/sahabat karib, yang berpartisipasi atas dasar solidaritas.

Fakta di lapangan memperlihatkan motivasi purnawirawan cenderung ke investor. Dalam hal ini, para purnawirawan yang terlibat dalam tim pemenang kedua pasangan calon pada Pemilu 2014 dan 2019 mendapatkan posisi politik di tingkat menteri, atau komisaris BUMN. Untuk kategori pertama, terdapat nama-nama purnawirawan TNI seperti Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Prabowo Subianto dll. Purnawirawan TNI pun lebih banyak menjabat posisi komisaris di BUMN yang bergerak di sektor energi, seperti Doni Monardo, Agus Suhartpno dll (Idris, 2021). Lebih lanjut, dalam tabel 1 di bawah, penulis coba merangkum beberapa purnawirawan yang menjabat posisi politik dalam pemerintahan dan BUMN.

Tabel 1 Purnawirawan dan Jabatan Politik Di Era Pemerintahan Joko Widodo  
Periode Kedua

No	Nama	Pangkat Terakhir di Kesatuan	Posisi Politik di Era Pemerintahan Joko Widodo
1	Luhut Binsar Panjaitan	Jenderal TNI	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2	Wiranto	Jenderal TNI	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3	Ryamizard Ryacudu	Letnan Jenderal TNI	Menteri Pertahanan
4	Sutiyoso	Jenderal TNI	Kepala Badan Intelijen Negara
5	Tedjo Edhy	Laksamana TNI	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6	Prabowo Subianto	Letnan Jenderal TNI	Menteri Pertahanan
7	Moeldoko	Jenderal TNI	Kepala Staf Kepresidenan
8	Fachrul Razi	Jenderal TNI	Menteri Agama
9	Tito Karnavian	Jenderal Polisi	Menteri Dalam Negeri
10	Hadi Tjahjanto	Marsekal TNI	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
11	Doni Monardo	Letnan Jenderal TNI	Komisaris Utama Mining Industry Indonesia
12	Martuani Sormin	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris Mining Industry Indonesia
13	Muhammad Munir	Letnan Jenderal TNI	Komisaris Mining Industry Indonesia
14	Agus Surya Bakti	Letnan Jenderal TNI	Komisaris Utama PT Aneka Tambang (Persero)
15	Bambang Sunarwibowo	Komisaris Jenderal Polisi	Komisaris PT Aneka Tambang (Persero)
16	Alfan Baharuddin	Letnan Jenderal TNI Marinir	Komisaris Utama PT Timah Tbk
17	Sufyan Syarif	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Timah Tbk
18	Satriya Hari Prasetya	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Timah Tbk
18	Agus Suhartono	Jenderal TNI	Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk
19	Andi Pahril Pawi	Marsekal Madya TNI	Komisaris PT Bukit Asam Tbk
20	Carlo Brix Tewu	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Bukit Asam Tbk
21	Hinsa Siburian	Letnan Jenderal TNI	Komisaris PT Freeport Indonesia
22	Condro Kirono	Komisaris Jenderal Polisi	Komisaris PT Pertamina (Persero)
23	Deden Juhara	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
24	Budi Waseso	Komisaris Jenderal Polisi	Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik
25	Bachtiar	Mayor Jenderal TNI	Direktur Pengadaan Perum Badan Urusan Logistik
26	Wibisono Poespitoahafi	Mayor Jenderal TNI	Direktur Pengadaan Perum Badan Urusan Logistik
27	Budiono Sandi	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
28	Hamli	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Sumber: Diolah penulis (2020) dari berbagai sumber, termasuk website resmi institusi dan perusahaan terkait

Kritik terakhir, keterlibatan purnawirawan dalam politik apakah mengganggu atau justru memperkuat kontrol sipil dan demokrasi. Pada prinsipnya, seperti dijelaskan Feaver (1996) tanpa harus melakukan kudeta pun, eksistensi militer dalam politik tetap saja mengganggu proses kontrol sipil dalam demokrasi. Seperti yang

terjadi di Mesir, Aljazair dan Turki (Cook, 2007:8), mereka (militer) berkuasa, tapi tidak memerintah (*ruling but not governing*). Dalam konteks Indonesia, tidak ada bukti-bukti langsung yang memperlihatkan. Namun yang jelas, sejak kontrol sipil pragmatis diimplementasikan pada 2014, kualitas demokrasi Indonesia pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2019, Indonesia mencatat skor terendah selama 14 tahun terakhir dalam indeks demokrasi yang dirilis *Economist Intelligence Unit* (EIU) (Putra, 2021).

Beberapa studi kasus yang menarik adalah manuver politik Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam suksesi Partai Demokrat (Ramadhan, 2021). Manuver ini bisa menjadi bukti empiris dimana seorang purnawirawan bisa menggunakan kekuatan politiknya saat sedang menjabat di pemerintahan untuk melakukan intervensi kepada partai politik. Selain itu, mengingat penurunan kualitas demokrasi Indonesia berkorelasi dengan aktivitas kelompok *buzzer* di internet. Moeldoko juga terindikasi mendukung aktivitas kelompok *buzzer* dari balik layar (Lamb, 2018).

## Perwira Aktif TNI/Polri dalam Jabatan Publik

Indikasi lain soal kontrol sipil pragmatis di Indonesia adalah pengisian jabatan publik oleh perwira aktif TNI/Polri. Dalam catatan Kontras, setidaknya ada 10 perwira aktif TNI yang merangkap jabatan sipil di kementerian/lembaga dan BUMN (CNN Indonesia A, 2021). Sementara di Polri, setidaknya ada 3 perwira aktif yang merangkap menjabat di kementerian (CNN Indonesia B, 2020). Jumlah ini masih bisa bertambah lagi, dengan asumsi masih ada deputy/staf khusus di kementerian/lembaga, atau komisaris di BUMN yang tidak terlacak jejaknya oleh publik dan media.

Tidak saja perwira aktif, purnawirawan TNI/Polri pun berpotensi menjadi pejabat sementara/pelaksana tugas (Plt) kepala daerah selama 2022-2024. Mengingat sebelum kepala daerah definitif terpilih pada Pilkada Serentak 2024, akan ada 272 daerah yang membutuhkan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah karena masa jabatan kepala daerahnya habis. Penulis mencatat kritik sudah disampaikan kelompok-kelompok masyarakat sipil, seperti: LIPI, yang mengkhawatirkan pelibatan perwira aktif dan purnawirawan TNI/Polri karena alasan politisasi aktor keamanan dalam Pemilu (Mashabi A, 2021); Perludem, yang menganggap pelibatan mereka berpotensi mengganggu supremasi sipil dalam kepemimpinan politik nasional (Mashabi B, 2021) Iluni UI, yang mengajak publik mewaspadaai kembalinya Dwi Fungsi ABRI di ruang publik (Mewangi, 2021); dan Kontras, yang menilai pelibatan mereka berpotensi menciptakan konsekuensi berupa maladministrasi terutama penyalahgunaan wewenang dan masalah dalam pembuatan kebijakan (CNN Indonesia C, 2021) dll.

Secara umum pengisian jabatan sipil oleh perwira aktif dianggap bisa diterima karena beberapa alasan, seperti: 1) kemampuan dan *skill* organisasi mereka dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi tata kelola instansi publik/badan usaha milik negara agar tidak melenceng dari tujuannya. Selain itu, alasan ideologis juga menjadi pertimbangan umum. Sederhananya, kontrol dan pengawasan oleh mereka

bisa melegitimasi tujuan instansi publik/badan usaha milik negara sesuai dengan kepentingan nasional; 2) purnawirawan dan perwira aktif secara relatif memiliki *networking* kuat, sehingga apabila ada masalah dengan instansi publik/entitas usaha lain, jalan keluar bisa segera ditemukan; 3) purnawirawan dan perwira aktif pun secara relatif memiliki kemampuan manajemen krisis dan manajemen strategis yang lebih baik dibandingkan sipil. Dengan demikian, mereka dianggap lebih matang dalam mengelola wilayah dengan kerentanan konflik tinggi, memimpin di tengah kondisi genting, serta perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor strategis; 4) Di Indonesia, Undang-Undang TNI Pasal 47 Ayat (2) membuka kemungkinan bagi perwira aktif untuk mengisi jabatan struktural di sektor keamanan dan strategis seperti: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Sekretariat Militer Presiden; Badan Intelijen Negara; Lembaga Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; Badan *Search and Rescue* Nasional; Badan Narkotika Nasional; dan Mahkamah Agung. Praktik ini pun lazim di negara-negara lain.

Namun, perihal pragmatisme ini juga patut dikritisi beberapa hal, mulai dari: 1) eskalasi politisasi organisasi militer oleh penguasa sipil berpotensi meningkat. Pola semacam ini lazim terjadi di negara-negara otoriter/praetorian. Misalnya selama era Orde Baru di Indonesia dan selama masa pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (Popescu, 2019). Di Indonesia, tren politisasi organisasi militer makin terlihat sejak pandemi Covid-19, dimana TNI terlibat langsung dalam penanggulangan dampak pandemi di masyarakat. Kementerian Pertahanan (2022) menilai pelibatan ini dibutuhkan karena institusi sipil terutama yang bergerak di sektor kesehatan memang tidak mampu sendiri mengatasi dampak pandemi, dan pandemi ini berdampak terhadap kondisi stabilitas sosial-politik nasional; 2) Di Indonesia, klaim Travis (2017) bahwa tensi HSM akan mendorong komunikasi produktif antara militer dengan institusi-institusi lain, ternyata tidak berlaku. Sejauh ini resistensi dari sejumlah kelompok masyarakat sipil terus muncul saat menyikapi isu perwira aktif TNI/Polri sebagai Plt. kepala daerah. Bahkan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa perwira aktif tidak bisa menjadi Plt. kepala daerah, resistensi ini tetap muncul karena peluang tersebut terbuka bagi perwira TNI/Polri yang telah mengundurkan diri dari korpsnya, atau menjadi purnawirawan. Putusan ini diatur dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022.

## Militerisme Masyarakat Sipil

Hal terakhir yang ingin penulis soroti mengenai implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia adalah berkembangnya satu jenis militerisme. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa konsep ini tergolong ambigu. Para akademisi sering terjebak dengan terminologi militerisasi dan militerisme. Apabila konsep pertama merujuk pada proses yang mendorong kondisi militerisme, baik dalam bentuk perilaku militeristik -seperti penggunaan kekerasan (secara berlebihan), dan pemikiran



militeristik -seperti penyebaran nilai-nilai dan ideologi militer di tengah kehidupan publik. Serta pada pembangunan kapabilitas organisasi militer, dengan indikator-indikator seperti: belanja pertahanan, kapabilitas angkatan bersenjata, impor dan produksi alutsista dan perang (Ross, 1987). Maka konsep kedua dapat didefinisikan sebagai sikap, perilaku dan pemikiran sosial yang melihat hal-hal berkaitan dengan perang dan persiapan perang sebagai aktivitas sosial yang normal dan diinginkan (Mann, 1987). Oleh Stavrianakis dan Selby (2013), militerisme dilihat sebagai konsep yang berkaitan dengan pengutamaan nilai-nilai militer, penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, peningkatan pengaruh organisasi militer dalam kehidupan publik.

Secara tipologi, militerisme dapat dibagi menjadi 4, yaitu: militerisme eksepsional (*exceptionalist*), militerisme “normal” (*nation-statist*), militerisme masyarakat sipil sipil (*civil society*), dan militerisme neoliberal. Tipe pertama berkaitan dengan konsep eksepsionalisme, dimana negara tidak perlu membuat produk hukum dan mematuhi prosedur hukum, karena dengan dukungan penuh masyarakat, negara dapat mengambil berbagai tindakan untuk menghadapi musuh dan ancaman keamanan (Mabee&Vucetic, 2018). Tipe kedua termanifestasi dalam kekuasaan pemimpin negara untuk mengimplementasikan kontrol sipil atas militer, ekonomi dipimpin oleh negara, serta mobilisasi sosial kekuatan-kekuatan (termasuk organisasi militer, polisi, intelijen, paramiliter dll) dengan karakter kekerasan. Tipe kedua juga terlihat dari kebijakan negara yang meningkatkan belanja pertahanan untuk menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi, di tengah pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Tipe ketiga, militerisme masyarakat sipil ditandai dengan kaburnya batas-batas antara militer dan masyarakat sipil. Penggunaan kekerasan terorganisir (*organized violence*) dengan karakteristik non-militer untuk mencapai tujuan-tujuan sosial-ekonomi, dengan dukungan negara (*state-supported*). Dalam praktiknya, purnawirawan sering terlibat (langsung dan tidak langsung) untuk melakukan intervensi politik, menggunakan prinsip-prinsip perang konvensional<sup>1</sup> dan perang non-konvensional<sup>2</sup>, nilai-nilai dan budaya militer pun disebarluaskan dalam kehidupan publik. Yang menarik, terjadi pergeseran nilai di tengah kondisi militerisme masyarakat sipil, dimana aktor-aktor non-tradisional mengambil peran sebagai penentu ancaman, atau pelaku sekuritisasi (*securitizing actor*) atas keamanan manusia dan keamanan publik, bukan aktor-aktor keamanan tradisional seperti militer, polisi atau intelijen (Mabee&Vucetic, 2018) (Mann, 1996).

Tipe terakhir adalah militerisme neoliberal, merujuk pada konfigurasi kekuatan dan hubungan sosial dimana mobilisasi militer dicapai melalui liberalisasi sosial-ekonomi melalui pembagian peran sipil dan militer. Secara umum, implikasi dari tipe militerisme ini antara lain: berkembangnya pengaruh kontraktor militer swasta dan perusahaan keamanan, privatisasi logistik militer, berkembangnya teknologi-

teknologi militer serta makin terintegrasinya industri alutsista nasional dengan pasar alutsista global (Mabee&Vucetic, 2018 dan Merand, 2014).

Menurut penulis, tipe pertama (militerisme eksepsional) tidak terjadi di Indonesia karena proses perumusan produk-produk hukum dan penegakan hukum tetap berlangsung. Bahkan dalam menghadapi ancaman-ancaman krusial seperti pandemi Covid-19 dan menyikapi isu-isu sensitif seperti pelibatan TNI/Polri. Pemerintah terlihat masih berpegangan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan tipe kedua (militerisme “normal”). Selain kontrol sipil atas militer masih berlaku. Praktik ekonomi tersentral di pusat -seperti dalam kasus UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Serta mobilisasi aktor-aktor keamanan konvensional masih terjadi, misalnya selama pandemi Covid-19 berlangsung, pengembangan *Food Estate* dll. Namun semua ini masih dalam tahap yang lazim. Termasuk tipe keempat (militerisme neoliberal), pembagian peran sipil dan militer memang berlaku. Namun privatisasi militer tidak berkembang pesat di Indonesia. Apalagi salah satu parameter militerisme neoliberal, yaitu industri pertahanan, di dalam negeri relatif belum berkembang pesat seperti di negara-negara lain.

Sebaliknya dengan tipe ketiga (militerisme masyarakat sipil) yang menurut penulis sedang terjadi di Indonesia. Dalam kasus Pemilu 2019, tim sukses yang beranggotakan purnawirawan dan pakar dengan latar belakang keilmuan pertahanan dan keamanan, terbukti beberapa kali menggunakan prinsip perang dalam operasi-operasi politik. Penggalangan massa di media sosial misalnya, didasarkan pada konsep “memenangkan perasaan dan pikiran” (*winning hearts and minds*) yang berakar dari studi kontra insurjensi dan studi hubungan sipil militer dalam konteks misi kemanusiaan. Pada tingkatan operasional dan taktis, konsep tersebut diimplementasikan dalam narasi-narasi yang (konsisten) mengkapitalisasi isu-isu SARA, memelihara politik identitas, memproduksi konten-konten berita palsu dan ujaran kebencian. Tujuannya, semata-mata untuk merebut perhatian publik atas satu pasangan calon.

Praktik militerisme masyarakat sipil tidak saja berlangsung selama Pemilu 2019. Melainkan sampai dengan hari ini. Penulis mengambil contoh kasus dimana kelompok pendengung (*buzzer*) berperan sebagai pelaku sekuritisasi (*securitizing actor*). Selama ini, kelompok pendengung masih konsisten melakukan sekuritisasi atas kelompok-kelompok masyarakat sipil tertentu, sebagai ancaman keamanan nasional. Proses sekuritisasi akan berlangsung bilamana terdapat 5 komponen, yaitu: subjek (pelaku) sekuritisasi (*securitizing actor*), ancaman eksistensial (*existential threat*), objek yang dilindungi (*referent object*), objek sekuritisasi (*audience*) dan *speech act* (Buzan, Waever & Wilde, 1996). Dalam kasus pendengung, mereka melakukan sekuritisasi kepada kelompok-kelompok yang bersebrangan atau kritis kepada pemerintah, dengan menganggap kelompok-kelompok ini sebagai ancaman bagi persatuan dan kesatuan nasional. Instrumen *speech act* berupa penggunaan narasi “Kampret”, “Kadrun”, “Teroris” dll di media sosial. Kasus ini membuktikan bahwa di Indonesia,

militerisasi masyarakat sipil membuat aktor-aktor non-pemerintah bisa menjadi pelaku sekuritisasi yang efektif. Berbeda dengan asumsi umum dalam teori sekuritisasi yang melihat aktor pemerintah sebagai pelaku utama sekuritisasi.

Melihat kondisi ini, penulis kembali mengkritisi argumen Travis (2017) bilamana tensi HSM akan mendorong komunikasi produktif antara kelompok sipil dengan kelompok militer, yang meningkatkan *national will* dan *national power*. Di Indonesia, implikasi kontrol sipil pragmatis berupa militerisme masyarakat sipil justru kontra-produktif, karena aktor-aktor keamanan non-tradisional justru ikut berkontribusi memecah belah masyarakat dengan konsisten melakukan kekerasan verbal di media sosial. Praktik militerisme ini pun tidak banyak membantu Presiden dalam menyikapi perkembangan perang dan konflik yang makin kompleks. Malah berkontribusi menciptakan kompleksitas konflik sosial-politik dalam negeri.

Penulis perlu menekankan bahwa militerisme tidak sepenuhnya buruk, selama berada dalam kondisi dan syarat-syarat tertentu. Pada pembahasan pertama soal purnawirawan yang terlibat dalam politik partisan dan kampanye politik, terlihat bahwa eksistensi mereka berguna bagi proses konsolidasi dan mobilisasi di internal partai. Kemudian dalam pembahasan kedua soal purnawirawan yang mengisi jabatan publik, secara normatif kemampuan dan *skill* purnawirawan yang diperoleh dari pengalaman selama di korps dapat berguna meningkatkan efektivitas proses manajemen organisasi di instansi publik, maupun badan usaha milik negara. Misalnya, berkaitan dengan disiplin para ASN dan pekerja, atau dalam proses pengambilan keputusan strategis. Selain itu, di tengah potensi perang dan konflik, militerisme bisa memperkuat nasionalisme masyarakat sehingga *national will* dan *national power* meningkat. Selain itu, di negara-negara sosialis, militerisme dapat mendorong praktik ekonomi tersentral, dimana peran negara sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam konteks Indonesia hari ini, program Bela Negara yang digagas Kementerian Pertahanan pun dikemas agar tidak kontradiktif dengan kondisi demokrasi, dimana tujuannya lebih ditekankan pada nilai-nilai cinta tanah air dan persatuan kesatuan nasional.

Seharusnya dengan kontrol sipil pragmatis, militerisme di Indonesia diarahkan ke tipe neoliberal. Fleksibilitas peran militer dalam kehidupan politik, dengan kepakaran dan kelebihan organisasi militer bisa bermanfaat dalam upaya membangun industri pertahanan seperti di Israel, memacu swasta dan perguruan tinggi untuk berinovasi dalam produk-produk *dual use*<sup>3</sup>, membangun sistem pertahanan non-militer di sektor-sektor tertentu dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi ancaman keamanan nasional dengan bertumpu pada sinergi dan kolaborasi sipil-militer seperti di Amerika Serikat. Praktik militerisme neoliberal pun sesuai dengan kondisi lingkungan strategis dimana ekonomi antar negara-bangsa mengalami kondisi saling terhubung (inter dependensi) satu sama lain. Termasuk dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun industri pertahanan dalam negeri

## Penutup

Kontrol sipil pragmatis adalah salah satu teori kontemporer dalam studi HSM. Berangkat dari pemikiran-pemikiran Moritz Janowitz -salah satu pengkritik awal gagasan kontrol sipil subjektif dan objektif yang diajukan Samuel Huntington. Seperti dalam diskursus HSM pada umumnya, teori ini berkembang di Barat (Amerika Serikat). Konsekuensinya, secara normatif teori ini lebih relevan untuk menjadi panduan HSM di negara asal Donald Travis -selaku penggagas teori ini, yaitu Amerika Serikat. Dalam konteks Indonesia, penulis menemukan sejumlah bukti dimana pemerintahan Joko Widodo sedang menjalankan kontrol sipil pragmatis. Bisa disimpulkan, teori ini hanya mampu menjelaskan kondisi yang berlangsung (*explaining*) di Indonesia, namun tidak cukup baik untuk memandu kondisi HSM seperti apa yang idealnya harus terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, argumen-argumen Travis mengenai keunggulan teori kontrol sipil pragmatis di atas kertas mampu dibantah secara empiris di lapangan. Travis menjelaskan bahwa kontrol sipil pragmatis akan meningkatkan kekuatan nasional dan akan mendorong komunikasi produktif antara sipil dengan militer. Ternyata tidak terjadi di Indonesia. Implementasi kontrol sipil pragmatis makin mendorong politisasi TNI/Polri oleh elit politik. Serta membuka ruang bagi aktor-aktor keamanan non-tradisional -yang notabene masyarakat sipil yang didukung purnawirawan, untuk menjadi pelaku sekuritisasi. Praktik-praktik ini jelas kontraproduktif dengan prinsip dan semangat demokrasi.

Selain itu, implementasi kontrol sipil pragmatis juga bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan di tubuh TNI/Polri. Secara tersirat, teori ini mendukung kembalinya Dwi Fungsi ABRI. Tentu dengan beberapa catatan, misalnya TNI/Polri harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan memahami batasan-batasan mereka dalam demokrasi. Sayangnya kondisi di lapangan memperlihatkan hal berbeda. Purnawirawan yang menempati jabatan politik beberapa kali terlibat konflik kepentingan politik dan ekonomi. Perwira aktif juga terbukti menyalahgunakan kekuasaan mereka ketika menjabat di institusi masing-masing.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Donald Travis dan Dr. Ionut Popescu dari Texas State University karena perdebatan di jurnal *Armed Forces & Society* telah menginspirasi penulisan artikel ini.

## Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penulisan, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka

- Abdulsalam, H. (2018). Dari Bot ke Cyber Army: Mengorganisasi Hoaks di Media Sosial. Retrieved from Tirto: <https://tirto.id/dari-bot-ke-cyber-army-mengorganisasi-hoaks-di-media-sosial-cFwY>
- Aminuddin, M. F. (2019). *Military Retirees in Politics: A Study on the Rise of Purnawirawan in Indonesian Political Parties 1998-2014* (Doctoral dissertation).
- Azanella, L. A. (2019). Viral Pendukung Jokowi Gelar Sayembara Rp 100 Miliar. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/19135881/viral-pendukung-jokowi-gelar-sayembara-rp-100-miliar-ini-tanggapan-tkn?page=all>
- Barry Buzan, O. W. (1996). *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Cook, S. A. (2007). *Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria and Turkey*. Maryland: John Hopkins University Press.
- CNN Indonesia A. (2019). Zulkifli: Pemilu Bukan Perang Badar atau Perang Total. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190314170942-32-377317/zulkifli-pemilu-bukan-perang-badar-atau-perang-total>
- CNN Indonesia B. (2020, June). Duduk Manis Jenderal Polisi Di Jabatan Sipil Era Jokowi. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630144023-12-519071/duduk-manis-jenderal-polisi-di-jabatan-sipil-era-jokowi/1>
- CNN Indonesia C. (2021, September). Kontras: 10 Perwira TNI Rangkap Jabatan Sipil. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916210531-20-695496/kontras-10-perwira-tni-rangkap-jabatan-sipil>
- CNN Indonesia D. (2021, September). TNI/ Polri Bisa Jadi Gubernur, Kontras Takut Orba Bangkit Lagi. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210925151641-32-699380/tni-polri-bisa-jadi-gubernur-kontras-takut-orba-bangkit-lagi>
- CNN Indonesia E. (2018, Oktober). Kivlan Zen Tuduh Tiga Partai Pendukung Jokowi Gandeng Komunis. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181013200836-32-338281/kivlan-zen-tuduh-tiga-partai-pendukung-jokowi-gandeng-komunis>
- detikNews A. (2014, May). Ini Formasi Lengkap Tim Pemenangan Jokowi-JK. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-2591025/ini-formasi-lengkap-tim-pemenangan-jokowi-jk>
- detikNews B. (2014, May). Susunan Lengkap Tim Pemenangan Prabowo-Hatta. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-2593888/susunan-lengkap-tim-pemenangan-prabowo-hatta>
- detikNews C. (2021, March). Survei Charta Politika: TNI dan Presiden Lembaga Tinggi Negara Paling Dipercaya. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d->

5511513/survei-charta-politika-tni-dan-presiden-lembaga-tinggi-negara-paling-dipercaya

- Erdianto, K. (2018, September). Para Jenderal di Times Jokowi dan Prabowo. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/28/15444491/para-jenderal-di-times-jokowi-dan-prabowo?>
- Feaver, P. (1996). "Huntington, Janowitz and the Civil-Military Problematique: The Question of Civilian Control". *Armed Forces & Society*, Vol. 23, No. 2, 149-178.
- Fiansyah, R. (2014, June). Sebut Prabowo Psikopat, Hendropriyono Dilaporkan ke Bareskrim. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/04/1511552/Sebut.Prabowo.Psikopat.Hendropriyono.Dilaporkan.ke.Bareskrim>
- Griffith, Z. & Simon, O. (2021). "Not Putting Their Money Where Their Mouth Is: Retired Flag Officers and Presidential Endorsements". *Armed Forces & Society*, Vol. 47, No. 3, 480-504.
- Hirschi, T. (2017). *Causes of delinquency*. London: Routledge.
- Huntington, S. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Harvard University Press.
- Idris, M. (2021, June). Deretan Pensiunan Jenderal Polisi Yang Jadi Komisaris BUMN. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/130123326/deretan-pensiunan-jenderal-polisi-yang-jadi-komisaris-bumn?>
- Ihsanuddin. (2019). Pamer War Room: Penghitungan Suara PDIP Tantang Kubu Prabowo Lakukan Hal Serupa. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/22/15511131/pamer-war-room-penghitungan-suara-pdi-p-tantang-kubu-prabowo-lakukan-hal>
- Janowitz, M. (1971). *The Professional Soldier, A Social and Political Portrait*. New York: Free Press.
- Kamil, I. (2022, April). Survei Indikator: TNI Jadi Institusi Paling Dipercaya Publik. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/20593091/survei-indikator-tni-jadi-institusi-paling-dipercaya-publik?>
- Krisiandi. (2019). Ketua DPR Minta Pemilu Tak Dikaitkan Dengan Perang. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/04/07323011/ketua-dpr-minta-pemilu-tak-dikaitkan-dengan-perang>.
- Kumparan. (2021, September). Survei Indikator: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR dan Parpol Terendah. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tni-lembaga-paling-dipercaya-publik-dpr-parpol-terendah>.
- Lamb, K. (2018). 'I Felt Disgusted': Inside Indonesia's Fake Twitter Account Factories. *The Guardian*. Retrieved from: <https://www.theguardian.com/world/2018/jul/23/indonesias-fake-twitter-account-factories-jakarta-politic>
- Mabee, B., & Vucetic, S. (2018). Varieties of Militarism: Towards a Typology. *Security Dialogue*, 49(1-2), 96-108.

- Mann, M. (1987). "The Roots and Contradictions of Militarism". Dalam *New Left Review* I (162) Mar/Apr 1987.
- Mann, M. (1996). "Authoritarian and Liberal Militarism: A Contribution From Comparative and Historical Sociology". In K. B. Steven Smith, *International Theory: Positivism and Beyond* (pp. 221-239). London: Cambridge University Press.
- Mashabi, S. (14, October). Wacana TNI/ Polri Jadi Pejabat Kepala Daerah Yang Tuai Polemik. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/14/10385281/wacana-tni-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-yang-tuai-polemik>
- Mashabi, S. (2021, October). Wacana TNI-Polri Jadi Pejabat Kepala Daerah Dikhawatirkan Munculkan Kecenderungan Politisasi Aktor Keamanan. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/09/07300061/wacana-tni-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-dikhawatirkan-munculkan>
- Merand, J. J. (2014). "The Varieties of Liberal Militarism: A Typology". *French Politics*, 177-191.
- Mewangi, G. T. (2021, October). Iluni UI Minta Publik Waspada Wacana TNI/ Polri Jadi Pejabat Kepala Daerah. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/2462769/iluni-ui-ajak-publik-waspada-wacana-tni-dan-polri-jabat-kepala-daerah>
- Nuary, G. (2019). Ma'ruf Amin Tanggapi Amien: Tidak Ada Perang Politik Jangan Menuduh. Retrieved from Detik: <https://news.detik.com/berita/d-4451142/maruf-amin-tanggapi-amien-tidak-ada-perang-politik-jangan-menuduh>
- Nurita, D. (2018, Oktober). Beda Tim Purnawirawan TNI Bravo 5 dan Cakra 19 di Kubu Jokowi. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1138098/beda-tim-purnawirawan-tni-bravo-5-dan-cakra-19-di-kubu-jokowi?>
- Nurita, D. (2019). Mengintip War Room Penghitungan Suara Internal Kubu Jokowi. Retrieved from Tempo: <https://pilpres.tempo.co/read/1197815/mengintip-war-room-penghitungan-suara-internal-kubu-jokowi/full&view=ok>
- Paat, Y. (2019, Februari). Purnawirawan Dukung Jokowi. Pengamat: Pukulan Telak Bagi Prabowo. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/politik/537291/purnawirawan-dukung-jokowi-pengamat-pukulan-telak-bagi-prabowo>
- Popescu, I. (2019). "Pragmatism and Practicality: Rethinking U.S. Civil-Military Relations Model for a Turbulent Era". *Armed Force & Society* Vol. 45, No. 1, 198-205.
- Putra, R. A. (2021, March). Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah Dalam Sejarah. Retrieved from <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>
- Ramadhan, A. (2021, August). Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutan Kelima. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/03/16120191/survei-indostrategic-tni-lembaga-paling-dipercaya-publik-kpk-urutan-kelima>

- Richard, M. (2021, October). Daftar Mantan Jenderal yang Punya Bisnis & Jadi Komisaris di Perusahaan Mentereng. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com/read/20211005/16/1450489/daftar-mantan-jenderal-yang-punya-bisnis-jadi-komisaris-di-perusahaan-mentereng>
- Rinaldo, Alvin, S., Rimadi, L., Romadoni, A., Ariyanto, Y., Salim, H. J., Taufiqurrohman. (2014, June). Melacak Jenderal Di Belakang Capres. Retrieved from <https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2057691/melacak-jenderal-di-belakang-capres>
- Ross, A. (1987). "Dimensions of Militarization in Third World". *Armed Forces and Society* Vol. 13 No. 4 Summer 1987 561-578.
- Selby, J. & Stavrianakis, A. (2013). "Militarism and International Relations in the Twenty-First Century". In *Militarism and International Relations: Political Economy, Security, Theory* (pp. 3-18). London: Routledge.
- von Clausewitz, C., Howard, M. E., & Paret, P. (1989). *On war*, indexed edition. *Trans. Michael Eliot Howard and Peter Paret. Reprint edition. Princeton, NJ: Princeton University Press.*

## Tentang Penulis

**Denny Indra Sukmawan** adalah dosen Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis memiliki minat riset seputar politik manajemen risiko dan krisis dalam investasi, politik sekuritisasi dan desekuritisasi, serta politik energi dan sumber daya alam.

**Rodon Pedrason** adalah dosen Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Sejak April 2020 menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Penulis memiliki minat riset seputar hubungan internasional, studi strategis dan studi keamanan.

---

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Istilah perang konvensional merujuk pada perang yang menggunakan senjata konvensional, taktik-taktik militer di medan perang. Tujuan utama perang konvensional adalah menghancurkan/melemahkan kekuatan lawan. Prinsip-prinsip perang konvensional yang dimaksud misalnya merujuk pada pemikiran Clausewitz tentang Pusat Gravitasi "Center of Gravity".

<sup>2</sup> Sementara istilah perang non-konvensional merujuk pada perang yang menggunakan senjata biologis, kimia, nuklir, siber. Termasuk diantaranya aktivitas gerilya, subversi, memecah belah, propaganda dll. Dalam perang non-konvensional, infiltrasi (tertutup dan sembunyi-sembunyi) lebih diprioritaskan dibanding agresi (terbuka). Tujuan utama perang non-konvensional adalah melemahkan lawan, merebut hati dan pikiran masyarakat.

<sup>3</sup> Produk *dual use* adalah produk yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat sipil dan militer. Contoh produk *dual use* antara lain internet yang pertama kali dikembangkan oleh militer Amerika Serikat untuk kepentingan komunikasi mereka. Kemudian ada *drone*, yang awalnya dikembangkan untuk tujuan perang konvensional, namun dalam perjalanan waktu digunakan masyarakat sipil untuk pemetaan, pembuatan video dll.